

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki pendekatan yang digunakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat untuk mengawasi iklan politik yang disiarkan selama Pemilu 2024. Pengawasan iklan politik sangat penting untuk menjaga proses demokrasi lokal tetap adil, transparan, dan bersih. Perwakilan lembaga penyiaran, komisioner, staf sekretariat, dan staf yang memantau isi siaran diwawancarai dan dianalisis melalui observasi dan analisis dokumen dalam penelitian kualitatif deskriptif ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Sumbar menggunakan tiga strategi pengawasan utama: preventif, kuratif, dan evaluatif. Strategi preventif digunakan untuk menyebarkan aturan, menerbitkan pedoman teknis, dan koordinasi lintas lembaga. Strategi kuratif menerapkan tindakan tegas terhadap pelanggaran, seperti teguran dan penghentian siaran. Strategi evaluasi digunakan untuk membuat laporan dan saran kebijakan. Selain itu, KPID meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu dan masyarakat untuk meningkatkan jangkauan pengawasan dan menyediakan sarana pengaduan publik. Namun, pengawasan masih menghadapi banyak masalah. Ini termasuk kekurangan sumber daya manusia dan teknologi, kekurangan regulasi teknis, dan tekanan politik dari pihak lokal. Meskipun demikian, berdasarkan teori regulasi media yang digunakan dalam penelitian ini, KPID Sumbar telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengimbangi kebebasan berekspresi dengan kepentingan publik. Mereka telah melakukannya dengan cara yang fleksibel dan terlibat. Di masa mendatang, penelitian ini diharapkan dapat membantu KPID dan lembaga terkait meningkatkan pengawasan iklan politik dan tata kelola penyiaran.

Kata Kunci: KPID Sumatera Barat, Strategi Pengawasan, Iklan Politik, Pemilu 2024, Regulasi Media

ABSTRACT

This study investigates the approach used by the West Sumatra Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) to monitor political advertisements broadcast during the 2024 regional elections. Monitoring political advertisements is crucial for maintaining a fair, transparent, and clean local democratic process. Representatives of broadcasting institutions, commissioners, secretariat staff, and staff who monitor broadcast content were interviewed and analyzed through observation and document analysis in this descriptive qualitative study. The results show that the West Sumatra KPID uses three main monitoring strategies: preventive, curative, and evaluative. The preventive strategy is used to disseminate regulations, issue technical guidelines, and coordinate across institutions. The curative strategy applies firm action against violations, such as warnings and broadcast suspensions. The evaluative strategy is used to produce reports and policy recommendations. In addition, the KPID is strengthening cooperation with the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) and the public to increase oversight reach and provide a public complaints channel. However, oversight still faces numerous challenges. These include a lack of human resources and technology, a lack of technical regulations, and political pressure from local parties. Nevertheless, based on the media regulation theory used in this study, the West Sumatra KPID has attempted in various ways to balance freedom of expression with the public interest. They have done so in a flexible and involved manner. Going forward, this research is expected to help the KPID and related institutions improve their oversight of political advertising and broadcasting governance.

Keywords: *West Sumatra KPID, Monitoring Strategy, Political Advertising, 2024 Regional Elections, Media Regulation*